



HUMANISME GUS DUR: PERGUMULAN ISLAM DAN KEMANUSIAAN, SEBAGAI JAWABAN DEHUMANISASI DI ERA DISRUPSI

Wahyudi Fatah

Universitas Nurul Jadid,

Email: abubakarahmed@gmail.com

Diterima tanggal: 1 Juli 2020

Selesai tanggal: 10 Juli 2020

ABSTRACT

This paper will explore about Gus Dur's thoughts of humanism. It has become important as an offer of dehumanization that is increasingly prevalent in this era. Starting from the aspect of education, socio-humanitarian, culture, and the power of the capitalist bureaucracy, Gus Dur's humanism is not a secular western humanism born of a critique of religious hegemony, but a birth of Islamic upbringing. The construction of Gus Dur's thought was built on three values that support and complement each other, namely Islamic universalism, Islamic cosmopolitanism, and the indigenization of Islam. This paper is a library research. By reading Gus Dur's Humanism, we will find the confidence of a Muslim who understands the task of humanity as a divine god.

Tulisan ini akan mengupas, menggali, dan mengeksplorasi pemikiran Gus Dur pada sisi humanisme. Pemikiran Presiden ke-4 RI ini menjadi penting sebagai tawaran dehumanisasi yang kian marak di era sekarang ini. Mulai dari aspek pendidikan yang mulai direduksi, sosial budaya yang nir-kemanusiaan, dan berkuasanya birokrasi kapitalis. Humanisme Gus Dur bukanlah humanisme barat sekular yang lahir dari kritik atas hegemoni agama, melainkan lahir dari pemuliaan Islam atas manusia. Konstruksi pemikiran Gus Dur dibangun berdasarkan tiga nilai yang saling menopang dan melengkapi, yaitu universalisme Islam, kosmopolitanisme Islam, dan pribumisasi Islam. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dengan membaca Humanisme Gus Dur, kita akan menemukan keyakinan seorang muslim yang memahami tugas kemanusiaan sebagai tuhan ketuhanan.

Kata Kunci: *Humanisme Gus Dur, Dehumanisasi, Islam dan Kemanusiaan*

PENDAHULUAN

Pada awalnya “Kursus Pemikiran Gus Dur”, kursus yang penulis adakan sebagai bagian dari kelas pemikiran Gus Dur jaringan Gusdurian ini ternyata membuahkan berkah mendalam. Tentu, karena kursus tersebut telah menyediakan “samudra penyelaman” yang lebih atas

pemikiran yang termulia, KH Abdurrahman Wahid. Pemikiran Gus Dur tidak hanya menyediakan rumus-rumus teoritis bagi suatu intelektualisme. Akan tetapi juga, menetapkan “garis-garis kebijaksanaan” bagi kehidupan seorang santri yang ingin menatap tegak di hadapan deru modernitas yang tak jarang melibas ruang

hening kemanusiaan. Bahkan secara psikologis, tulisan-tulisan Gus Dur memiliki efek sufistik yang meneguhkan hati.

Kursus pemikiran Gus Dur sendiri tidak sebatas diskusi rutin dengan rangkaian tema yang hilir-mudik tidak sistematis. Tulisan ini merupakan upaya mengakademikkan pemikiran Gus Dur. Bermodalkan sedikit pengetahuan tentang pemikiran Gus Dur, penulis berketetapan hati untuk menyampaikan materi di dalam kursus tersebut secara reguler.

Ada benang persoalan yang menjadi konstruksi Gus Dur, yaitu hubungan antara islam dan modernisasi dalam konteks pembangunan di Indonesia. Pernyataan yang menggelitik bagi Gus Dur adalah bagaimana mengembangkan pandangan islam yang selaras dengan pembangunan di Indonesia. Dalam kaitan ini, pembangunan tidak dipahami dari kaca mata politik-ekonomi *an sich*, tetapi dalam kerangka medernisasi secara umum. Ada dua hal yang mendasar dalam pemikiran Gus Dur. *Pertama*, jalinan struktural pemikiran Gus Dur. *Kedua*, humanisme dalam pemikiran Gus Dur. Namun, penulis memfokuskan kajian ini dalam ranah pemikiran humanisme Gus Dur.

Arus modernitas yang semakin dinamis dan tak terbendung tentunya tantangan dan problematika umat juga semakin komplek, dengungan dehuma-

nisasi semakin terdengar kencang akibat merosotnya moral anak bangsa yang kian hari semakin tak teratasi. Tentunya aspek sosial negatif ini harus segera diatasi demi menjaga Indonesia dari kehancuran dini dan menjaga asa Indonesia emas beberapa tahun ke depan. Konsep humanisme Gus Dur sangat cocok dan dibutuhkan sebagai tawaran sekaligus jawaban degradasi moral dan krisis kemanusiaan yang kian marak pada era ini.

Artikel ini hendak mendasarkan pluralisme Gus Dur kepada dasar pemikiran dan peruangan yakni humanisme. Secara tak langsung menyatakan bahwa Gus Dur bukan hanya bapak pluralisme melainkan terlebih bapak kemanusiaan. Mengapa? Karena pluralisme Gus Dur merupakan salah satu komitmen Gus Dur atas kemanusiaan. Karena penghargaan Gus Dur atas non-muslim merupakan penghargaan dan perlindungan atas kaum lemah. Gus Dur menyatakan:

*This tradition of compassion was continued by the rich law literature (fiqh), as shown by a treatise written a few hundred years ago, which states that the duties of the head of state include the obligation to provide food, clothes and shelter for his citizen, to protect them against attack and to protect the right of those protected by law.*¹

¹ Abdurrahman Wahid, "Development by Developing Ourselves," makalah seminar the study day on ASEAN Development Process and Their Effect and people, di Penang Malaysia 22-25 november 1979, hlm. 1

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kajian pustaka (Library Research). Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik Library Research. Langkah-langkahnya adalah dengan mengumpulkan data dalam buku, jurnal, dan laporan penelitian yang terdapat di perpustakaan atau online.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Agar memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan tema yang penulis angkat, serta dapat menghubungkan beberapa permasalahan yang ada dengan teori yang digunakan guna untuk menemukan kejelasan atas penelitian yang sedang digunakan.

PEMBAHASAN

1. Humanisme

Humanisme adalah paham yang menempatkan manusia sebagai pusat realitas. Manusia begitu diagungkan karena ia memang merupakan spesies termulia yang memiliki kecakapan, tidak hanya bersifat teknis namun juga normatif. Sebagai pusat relitas manusia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai subjek pengolah alam sekaligus objek tujuan dari pengolahan alam tersebut.

Sebagai pemikiran, paham dan gerakan, humanisme lahir di eropa sebagai reaksi atas peradaban dehumanisasi, dari abad pertengahan yang menampilkan horror persatuan antara agama dan negara. Di dalam persatuan ini, manusia menjadi kerumunan sholeh yang harus tunduk pada doktrin gereja atas nama tuhan. Isu utamanya bukan kebebasan manusia dalam merumuskan diri dan dunia, melainkan keselamatan jiwa sehingga bisa menebus dosa asal. Situasi ini dianggap anti humanis karena tidak memberi kesempatan pada manusia untuk menggunakan potensi terbesarnya, akal budi untuk mengatur kehidupannya sendiri. Semua telah ditentukan gereja dan negara atas bama tuhan. Maka agama, gereja, dan tuhan akhirnya menjadi *common enemy* dari kaum humanis yang meniscayakan runtuhnya agama demi tegaknya kemanusiaan.

Kemanusiaan sebagai antithesis dari ketuhanan inilah yang menjadi ciri utama dari humanisme modern era pencerahan. Ia sering disebut humanisme kritis sebab kritis terhadap otoritas gereja yang membangun kemanusiaan.² Kaum humanis ditandai dengan pendekatan rasional terhadap manusia yang tidak terburu-buru melakukan hubungan singkat

² Sebastian Gradner, *Kant and the Critique of pure Reason*. Routladge Philosophy Guiedbook, 1999.hlm. 331-333

dengan otoritas wahyu ilahi, tetapi lebih dulu lewat penelitian cermat atas ciri keduniawian dan alamiah manusia. Kebudayaan tampil ke depan menggeser agama. Manusia terutama dimengerti dari kemampuan-kemampuan alamiahnya, seperti minat intelektualnya, pembentukan karakternya, apresiasi etisnya. Perhatian ditumpahkan pada toleransi, vitalitas jiwa, keelokan raga, persahabatan, Semua itu dicakup dalam kata humanis.

Gerakan humanis ini dimulai di Italia lalu merambat dengan cepat ke Jerman, Prancis, Belanda, dan seterusnya. Sulit dipastikan mana yang lebih dahulu berperan dalam modernisasi Barat, humanisme atau ilmu pengetahuan modern.³ Namun keduanya saling bahu-membahu alam mengukuhkan suatu cara berpikir rasional yang menempatkan manusia sebagai pusat segala sesuatu. Salah satu perkembangan ilmu-ilmu modern dalam hal ini ilmu alam dengan humanisme modern yang semakin skeptis terhadap agama adalah Isaac Newton.

Secara historis, humanisme memisahkan diri pada peradaban Yunani-Romawi. Hal ini bisa dipahami sebab ia tetap merupakan bagian dari kebangkitan peradaban Barat yang memiliki akar pada

kebudayaan Yunani dan Romawi kuno.⁴ Selayaknya filsafat dan modernitas, humanisme menjadi bagian dari corak umum peradaban Barat yang lahir berkat penemuan kembali kebudayaan Yunani-Romawi kuno. Dalam kaitan ini, kebudayaan Renaisans ditujukan untuk menghidupkan kembali humanisme klasik yang sempat terhambat oleh era kegelapan. Humanisme Renaisans jauh lebih dikenal karena penekanannya pada individualisme.⁵

Kemuliaan manusia terletak pada kebebasannya untuk menentukan pilihan sendiri dalam posisinya sebagai penguasa atas alam. Gagasan ini mendorong munculnya pemujaan tidak terbatas pada kecerdasan dan kemampuan pada individu dalam segala hal. Dengan demikian, gambaran manusia yang dicita-citakan humanisme Renaisans adalah manusia universal, yakni manusia yang berkat kecerdasannya bisa maju dan berkembang penuh dalam seluruh aspek kehidupannya, khususnya dalam aspek ilmu pengetahuan, kesenian, dan kebudayaan⁶, yang kemu-

³ Fran Magnis Suseno, *Menalar Tuhan*. Yogyakarta: Kanisius, 2006. hlm. 64-68.

⁴ F. Budi Hardiman, *Humanisme dan Sesudahnya, Meninjau Ulang Gagasan Besar Tentang Manusia* (Jakarta: keputakaan populer gramadia, 2012), hlm. 8-12

⁵ Giovanni Pico Della Mirandola, *oration on the dignity of man*. Washington D.C.: gateway edition, 1956, hlm. 1-10

⁶ Simon Petrus L. Tjahjadi, petualangan intelektual, konfrontasi dengan para filsuf dari zaman Yunani hingga zaman modern. Yogyakarta: kanisius, 2004, hlm. 176-177

dian lahir humanisme abstrak yang terlepas dari konteks particular komunitas menurut Geertz, manusia meudalam humanisme modern digambarkan sebagai mahluk berakal yang tampak bila ia menanggalkan kostum-kostum kebudayaan.⁷

Kemanusiaan sebagai individu otonom yang bebas menentukan diri berdasarkan akal budi dan onotomi ini kemudian menjadi prinsip universal kemanusiaan, telah berdiri tegar di tengah dunia yang tampak tuhan. Dalam arti, kemanusiaan dalam humanisme sering dipahami sebagai pemberontakan manusia atas tuhan, sebab tuhan dan otoritas agama sering mengkebiri manusia sehingga kemanusiaan tidak berkembang mencapai titik penuhannya.⁸

2. Humanisme Islam

Humanisme ala gur dur berada pada ranah diskursif, yaitu dengan memberikan sumbangan agama bagi humanisme. Artinya humanisme gur dur adalah humanisme perspektif islam, sebagai antitesis dari humanisme ateis yang menawarkan pandangan lain yang berbeda dengan tradisi humanisme ateis modern. Pandangan ini lahir dari prinsip ketuhanan atas kemanusiaan. Ia merupakan perintah

langsung dari tuhan sebagai bagian dari penugasan allah atas manusia sebagai *kholifahtullah fil al-ardh*. Kedua, humanisme Gus Dur dalam terang HAM di Indonesia.Gus Dur dalam hal ini akan terlihat sebagai pembela HAM universal. Namun pada saat bersamaan, sebagai penggerak kemanusiaan di ranah particular, melalui nilai-nilai particular masyarakat. Penggalan humanisme di dalam pemikiran Gus Dur menjadi penting untuk melihat prinsip dasar dari segenap pemikiran dan gerakannya, sejak gerakan sosial dan politik praktis.

Pada titik ini, ia merupakan penemuan kami dalam proses pembacaan panjang atasnya. Ini menandakan bahwa tanpa pembacaan mendalam, humanisme tidak akan bisa ditemukan di dalam pemikiran Gus Dur. Sebab, Gus Dur hanya menyelipkan perspektif humanistic di dalam lapisan terdalam dari pemikirannya. Hal ini terjadi karena Gus Dur sering membungkus humanisme di dalam terma-terma seperti kesejahteraan rakyat, keadilan, persamaan di depan hukum, demokrasi, hingga toleransi beragama.

3. Jalinan Struktural Pemikiran

Pemikiran Gus Dur konon selalu kontroversial dan sulit dipahami. Pemikiran ini sering menabrak *mainstream* pemahaman masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim dan NU

⁷ F. Budi Hardiman, *Humanisme dan Sesudahnya...*, hlm. 35

⁸ Don evan. Humanisme and religion. Dalam don evans humanism, historical and contemporary perspective, Washington D.C: Washington area secular humanist. 1999, hlm. 1-5

yang ia nahkodai. Resikonya, belum lagi pemikiran itu pahami, Gus Dur sendiri telah dicaci, misalnya melalui sebutan pembela PKI, pembela Ahmadiyah dan lainnya. Menurut kami, pernyataan itu masuk akal belaka. Artinya, sejak di dalam dirinya sendiri, pemikiran Gus Dur memang kontroversi. Namun, hal ini menggambarkan garis-garis pemahaman awam masyarakat yang memang rapuh dan perlu digedor. Gedoran pemikiran itu telah Gus Dur lakukan demi pemahaman yang lebih mendalam atas persoalan yang sebelumnya hanya dipikirkan masyarakat secara selang pandang. Akan tetapi, secara substantif terjadinya kontroversi atas pemikiran Gus Dur sebenarnya disebabkan oleh ketidakpahaman atas pemikiran itu. Artinya masyarakat kurang memahami landasan dan pikir dan tujuan normatif dari pemikiran Gus Dur.

Kami sebut pemikiran Gus Dur biasa-biasa saja karena prinsip dan tujuan yang mendasarinya, biasa saja. Ia disebut biasa karena kedua hal itu merupakan prinsip dan tujuan normatif yang ada di dalam setiap pemikiran refleksi-historis. Secara mendasar, prinsip dan tujuan itu mengacu pada pembelaan Gus Dur terhadap harkat tinggi kemanusiaan, yang pada suatu titik ia dasarkan pada tradisi keislaman yang mendalam. Jadi, jika dirumuskan, corak atau jenis kelamin

pemikiran Gus Dur ialah pertemuan antara keislaman dan kemanusiaan. Jika meminjam Bourdieu, prinsip keislaman adalah habitus yang telah menstruktur dalam alam bawah sadar Gus Dur, dan oleh karenanya menjadi pola strukturasi atas hubungan antara pemikiran Gus Dur dan persoalan yang dipikirkannya. Atau jika meminjam Habermas, prinsip keislaman adalah *lebenswelt komunikatif* Gus Dur.⁹ Pertemuan antara keislaman dan kemanusiaan ini misalnya terbaca di dalam pemikirannya atas ayat al-qur'an (al-Maidah:32), *waman ahyana fakaannama ahya al-naasa jami'a*. barang siapa yang menolong kehidupan seorang maka seakan ia telah menolong semua umat manusia. Pertemuan ini juga tersirat dalam penjelasan Gus Dur bahwa agama dan kemanusiaan haruslah disatukan. "Agama tanpa kemanusiaan akan melahirkan fundamentalisme".¹⁰ Dari dua ungkapan ini, terpahami bahwa Gus Dur mendasarkan prinsip kemanusiaan di dalam tradisi islam serta menghadirkan prinsip kemanusiaan ke dalam prinsip keislaman. Dalam kaitan ini, prinsip kemanusiaan Gus Dur selaras dengan

⁹ Jurgen Habermas, *The Theory Of Communicative Action, lifeworld and system: A critique of fungsionalis reason*. Boston: beason press, 1985, hlm, 113-153

¹⁰ Aristoteles. *Nicomachean ethick*, sebuah kitab suci etika. Embon kenyowati. Jakarta: teraju, 2004, hlm, 1-25

humanisme modern. Pertemuan Gus Dur dengan humanisme ini bisa dilacak dari pertualangan intelektualnya, baik secara literal maupun riil. Secara literal, perjumpaan dengan humanisme eropa terlacak dari pembacaan Gus Dur atas buku eropa sentris, misalnya aera eropa karya Jan Romein.¹¹ Kemudian prinsip kemanusiaan Gus Dur sebagai seorang muslim mendasarkan kemanusiaan itu di dalam tradisi islam, yakni: dalam apa yang ia sebut sebagai *ghayat al-mashlahat* yang disediakan oleh tujuan utama syariat (*maqasid al-syariah*) berupa perlindungan atas hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak kepemilikan, dan hak katas kesuciaan keluarga.¹²

4. Pribumisasi Islam

Gagasan ini merupakan yang paling populer dan menjadi trade mark darinya yang menandai keprihatinan Gus Dur atas kebudayaan islam di Indonesia di tengah ancaman arabisasi. Pribumisasi islam berada pada dua belahan ruang-waktu. Di satu sisi, ia berada di ruang masa lalu, tempat islam pertama kali hadir di nusantara. Sementara itu di sisi lain pribumisasi islam berada pada konteks kekinian, ketika geo-kultural nusantara

telah berubah menjadi geo-politik Indonesia.¹³ Dengan demikian pribumisasi islam merupakan gagasan yang menandai suatu bentuk islam Indonesia.

Gagasan ini menandakan cara baca yang digunakan Gus Dur untuk melihat proses islamisasi nusantara secara realitas.¹⁴ Oleh karena itu, pribumisasi islam tidak sebatas proses pembumian islam yang dilakukan oleh Gus Dur, tetapi realitas keislaman di nusantara. Yang kemudian bisa ditempatkan sebagai metodologi bagi proses pembumian nilai-nilai islam ke ranah budaya yang merupakan realitas masyarakat dan kehidupan.¹⁵ Sebagai sebuah metode pribumisasi islam memang memiliki ranah sendiri. Ranah tersebut yakni hubungan antara islam dan hukum kebudayaan sebagai upaya manusia mengolah kehidupan. Pribumisasi islam ini mempertemukan agama dan budaya dengan sangat harmonis tanpa kontradiksi. Pada titik inilah agama dan budaya menggambarkan hubungan ambivalen tetapi sekaligus saling membutuhkan. "Agama dan budaya mempunyai indenpendensi masing-masing tetapi keduanya mempunyai wilayah

¹¹ Lihat Prof. J.M. Romein, *Aera Eropa, Peradaban Eropa Sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*. Bandung: Ganaco, 1956, hlm, 20-53

¹² Abdurrahman Wahid, *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*. Pelita, 26 Januari 1988, hlm, 8.

¹³ Abdurrahman Wahid, *Islam In Indonesia: Challenge and future prospect*. Yogyakarta: LKiS, 1985, hlm. 1.

¹⁴ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam, Dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001, hlm, 99.

¹⁵ Abdurrahman Wahid, *Pesantren sebagai Sub Kultural, dalam Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.

tumpeng tindih. Bisa dibandingkan independensi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Orang tidak dapat berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Di antara keduanya terjadi tumpeng tindih sekaligus pembedaan-pembedaan.¹⁶

Kami membagi pendefinisian kedalam dua aspek yaitu negatif dan positif. Definisi positif, pribumisasi islam bukanlah jawanisasi atau sinkretisme, sebab pribumisasi islam hanya mempertimbangkan kebutuhan local di dalam perumusan hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri.¹⁷ Artinya, ia merupakan kesadaran akan penghargaan akan akomodasi kebutuhan local dalam perumusan hukum islam.¹⁸

Definisi negatif, dalam proses ini pribumisasi islam, pembaruan islam dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap dengan sifat islamnya.¹⁹ Karena adanya prinsip-prinsip yang keras dalam hukum islam, maka adat tidak bisa mengubah nash itu sendiri melainkan hanya mengubah dan mengembangkan

aplikasinya saja yang memang akan berubah dengan sendirinya.

Pada titik inilah kita sampai pada kesimpulan definitif atas pribumisasi islam. Pertama, pribumisasi islam adalah kontekstualisasi islam, yaitu tentang akomodasi adat oleh fiqh, pengembangan aplikasi nash. Kedua, pribumisasi islam sebagai kulturisasi islam. Poin ini yang melahirkan manifestasi islam dalam kultur local.²⁰

5. Kehidupan Sosial Manusiawi

Sosial budaya Gus Dur merupakan pertemuan antara refleksi antara kondisi masyarakat dengan idealitas kebudayaan yang menjadi arah normative bagi masyarakat tersebut. Kebudayaan Gus Dur sebut sebagai kehidupan sosial manusiawi (*human social life*) yakni sebuah kondisi masyarakat yang memanusikan kehidupan sosialnya. Kami mencoba mengurai dua macam pemikiran Gus Dur, yakni pemikiran sosila dan kebudayaan.

Pemikiran sosial Gus Dur adalah pemikiran tentang masyarakat yang merupakan tanggapan atas ilmu-ilmu sosial dimasanya. Tanggapan atas itu kemudian melahirkan pemikiran sosial Gus Dur sebagai refleksi otentik dari seorang pemikir keagamaan. Ada dua model ilmu sosial yang ditanggapi Gus Dur secara kritis. Pertama, fungsionalisme struktural

¹⁶ J.W.M. Bakker SJ, Filsafat kebudayaan, Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Kanisius, 1984.

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi islam...*, hlm, 117

¹⁸ Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur...*, hlm, 85

¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi islam...*, hlm, 119-123

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi islam...*, hlm, 132-133.

personian. Kedua, evosionisme antropologi, Gus Dur mengkritik pendekatan fungsionalisme terhadap masyarakat yang lebih menekankan aspek integratif. Artinya masyarakat didekati selayaknya biologi mendekati tubuhyang memiliki organ-organ sosial yang saling menguatkan. Pendekatan fungsionalis terlalu menekankan aspek perpaduan dan penyatuan dari ajaran agama dengan melupakan aspeknya yang bersifat mengubah. Dengan wataknya yang demikian agama tidak selalu menekankan segi-segi harmoni dan aspek-aspek integratif dalam kehidupan masyarakat, tetapi sering kali justru menimbulkan konflik-konflik baru karena misinya yang tranformatif itu mendapat tantangan dari sebagian anggota masyarakat.²¹ Sedangkan kerangka evolusionisme antropologi yang dihadapi Gus Dur terdapat dalam kritik evolusionisme atas pesantren sebagai masyarakat tradisional.²²

6. Human Sosial Life

Dari pemikiran sosial, kita masuk dalam pemikiran kebudayaan Gus Dur. Corak pemikiran kebudayaan telah bisa terbaca dalam model pemikiran sosial di atas yang merujuk pada dua hal.

²¹ Abdurrahman Wahid, *Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus dari Jombang, Dalam Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2010, hlm. 74-75

²² Abdurrahman Wahid, *Principle Of Pesantren Education*, makalah The Pesantren Education Seminar, Berlin, oleh TU Berlin FNS, Juli 9-12, 1987, hlm 4.

Pertama, kritik atas penempatan agama sebagai nilai intregratif kepada nilai tranformatif. Agama kemudian memiliki peran perubah, dari kondisi yang tak berkeadilan kepada struktur masyarakat yang berkeadilan. Kedua, advokasi kebudayaan pesantren melalui perumusan struktur budaya di dalam subcultural pesantren.²³

Perlulah kita menelisik teks awal Gus Dur tentang kebudayaan,” kebudayaan semata-mata warisan yang sah milik suatu masyarakat, karena kebudayaan adalah seni hidup yang menghasilkan pilar-pilar untuk menjaga tatanan sosial. Kebudayaan bukan hanya ditafsirkan sepihak untuk semata-mata memberikan tekanan pada kesenian, sesustraaan, Bahasa dan apa saja yang memiliki estetika.”²⁴

7. Humanisme Gus Dur

Dari segenap pemikiran sebelumnya sejak rangkaian pemikiran islam hingga pemikiran kebudayaan, demokrasi, dan sosial kita bisa menemukan dasar keprihatinan yang menggerakkan Gus Dur untuk berpikir dan bertindak. Keprihatinan ini adalah struktur masyarakat yang timpang yang membuat manusia terhambat untuk memenuhi kebutuhannya. Dasar

²³ Abdurrahman Wahid, *Negara dan Kebudayaan, dalam pergumulan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001, hlm. 3-4

²⁴ Syaiful arif, *Humanisme Gus Dur...*, , hlm, 220.

keprihatinan ini jarang terlihat tetapi akan menemukan ketika kita menelusup pada kedalaman rangkaian pemikiran yang komprehensif.

Kami menyimpulkan bahwa dasar dari segenap pemikiran Gus Dur adalah humanisme. Maksud dari humanisme di sini adalah pemuliaan Gus Dur atas martabat yang tinggi, khususnya dihadapan tuhan dan oleh karena itu, manusia harus dimuliakan. Dengan demikian manusia menjadi terminal akhir dari segenap pemikiran dan gerakan Gus Dur melampaui nilai-nilai apapun bahkan formalisme islam yang sering ia kritisi.

Terdapat beberapa sinyal yang menunjukkan humanisme itu. Pertama, pesan Gus Dur yang menyatakan, "agama harus disandingkan dengan kemanusiaan. Jika tidak ia akan menjadi senjata fundamentalistik yang memberangus kemanusiaan."²⁵ Kedua, pemegang-teguhan Gus Dur atas surat al-maidah ayat 32, *waman ahyana fakaannama ahyannasa jami'a*. barang siapa yang membantu kehidupan seseorang maka sama dengan membantu kehidupan semua umat. Ayat ini, merupakan ayat utama Gus Dur dan menjadi dasar pengabdian hidupnya.²⁶

²⁵ Pernyataan ini disampaikan Gus Dur di pengajian rutin pesantren Cianjur pada Maret 2009.

²⁶ Informasi akan hal ini disampaikan oleh pemangku pesantren Cianjur, dan santri senior Gus Dur, Kiai Muhammad Mustofa.

Asumsi dasar ini menyangkut pandangan awal Gus Dur atas manusia dan haekat nilainya bagi Gus Dur. Menurut Gus Dur," pesan-pesan yang dibawakan islam pada umat manusia adalah sederhana saja, bertauhid, melaksanakan syariah, menegakkan kesejahteraan di muka bumi. Kepada kita telah diberikan contoh sempurna yang harus teladani sejauh mungkin yaitu nabi Muhammad saw".²⁷ Ungkapan di atas tentu mewakili keyakinan religius Gus Dur sendiri. Sebuah keyakinan yang lahir dari kedalaman batin seseorang muslim yang memahami dalam tiga hal: bertauhid, bersyariat, dan kesejahteraan manusia. Sebagai keyakinan humanistik, tiga hal dasar ini menunjukkan dasar keagamaan bagi humanisme. Sebagai keyakinan keagamaan, tiga dasar ini menunjukkan dasar humanistik. Artinya pemuliaan Gus Dur atas manusia atas upaya mensejahterakan anak adam ini dilakukan setelah Gus Dur bertauhid dan bersyariat. Oleh karena itu, dalam pemikiran Gus Dur kemanusiaan tidak bisa dibentuk dengan syariat dan tauhid. Sebab sebaliknya kemanusiaan menjadi amal bagi keimanan dalam kerangka syariat.

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Pengembangan islam bagi pengembangan budaya Indonesia, dalam pergulatan negara, agama, dan kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001, hlm 153.

Kemanusiaan yang menjadi dasar ketiga setelah tauhid dan syariat ini Gus Dur landaskan pada peran kenabian Muhammad saw. Sebagai *rahmatul lil alamin*. Hal ini menarik karena Gus Dur memaknai rahmah tidak hanya dengan kasih sayang tetapi kesejahteraan. Dalam makna kesejahteraan ini, rahmah memiliki makna praksis sebab ia akan mengupayakan kesejahteraan di tengah realitas hidup yang tidak sejahtera. Dengan demikian, asumsi dasar manusia menurut Gus Dur adalah derajat kemuliaan manusia dihadapan tuhan, karena tugas yang diberikan tuhan kepada manusia untuk meneladani peran pembawa kesejahteraan umat manusia dari rasullah. Dengan cara ini bisa dipahami kenapa kerja penciptaan kesejahteraan manusia menjadi amal ketiga setelah tauhid dan syariat. Ketiga hal tersebut merupakan pesan dasar dari islam. Dengan cara ini pula kita bisa memahami bahwa dasar kemanusiaan Gus Dur adalah ajaran islam, yang menempatkan pemuliaan manusia sebagai salah satu nilai utamanya.

Pendasaran kemanusiaan dari ajaran islam menjadi titik tolak keyakinan intelektual Gus Dur. Hal ini terpatri dalam pemahaman atas yang paling universal di dalam islam. Gus Dur memaparkan, "universalisme islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting, yang terbaik dalam ajaran-ajarannya. Rangkaian

ajaran yang meliputi berbagai bidang seperti hukum, fiqh, keimanan, etika. Prinsip-prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum, perlindungan warga masyarakat dari kelaliman dan kesewenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan dan pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan, semuanya jelas menunjukkan kepedulian di atas."²⁸

Dari paparan di atas terlihat bahwa Gus Dur menemukan universalisme islam di dalam ajaran kemanusiaan. Artinya segenap nilai utama yang meliputi tauhid fiqh, dan ahlak ternyata menunjukkan kepedulian mendalam atas nasib kemanusiaan.

Hal ini tentu bertentangan dengan kalangan formalis yang menempatkan ajaran tauhid dan fiqh di atas manusia. Namun hal ini menjadi wajar ketika sejak awal, Gus Dur telah menanamkan keyakinan atas keesaan allah di dalam perintahnya untuk memuliakan manusia sebagai pembawa kesejahteraan di muka bumi. Tidak ada benturan antara manusia dan tuhan sebab manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Pada titik ini humanisme Gus Dur bukan humanisme sekuler yang bisa eksis ketika tuhan ditiadakan. Humanisme Gus Dur bukan merupakan "humanisme tauhid" sebab kemuliaan

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Universalisme Islam...*, hlm, 179-180.

manusia lahir dari keyakinan mendalam atas perintah ketuhanan. Hal serupa dengan pengaitan fiqh dan kemanusiaan. Fiqh sebagai ratu pengetahuan muslim yang mewadahi hukum-hukum syariat, ternyata menyediakan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Tujuan utama inilah yang disebut sebagai tujuan utama syariat (maqasid al-syariah) yang menetapkan lima hak dasar manusia sebagai argumentasi dasar hukum islam. Maka, kemanusiaan akhirnya tidak berbenturan dengan hukum islam. Justru sebaliknya syariat utama dari hukum islam dan seluruh syariat Muhammad adalah perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Hal senada dengan kaitan ahlak dan kemanusiaan yang di dalam pemikiran Gus Dur memang menjadi ruang formal kemanusiaan. Mengapa? Karena Gus Dur senantiasa memahami ahlak dalam kerangka sosial sehingga menjadi etika sosial. Etika sosial islam inilah yang menunjukkan kepedulian mendalam atas kemanusiaan yang terjaga dalam rukun islam yang bersifat sosial. Berbagai perintah akan pengucapan syahadat di hadapan public, shalat jamaah, zakat, puasa, dan haji merupakan amal keagamaan yang memiliki dampak kemanusiaan.

Hal yang paling menarik adalah penempatan kemanusiaan sebagai univer-

salisme itu sendiri. Hal ini menarik karena Gus Dur tidak menempatkan Allah misalnya atau tauhid sebagai universalisme islam. Hal ini tentu kontroversial dan membuahkan caci-kafir atasnya. Namun ia bisa dipahami dalam kerangka pemahaman Gus Dur atas kemanusiaan atas perintah utama dari Tuhan, sebagai manifestasi atas pertunjukannya kepada manusia sebagai kholifatullah. Runtutan logika yang lahir dari asumsi dasar manusia perspektif islam inilah yang perlu dipahami, untuk memahami kemanusiaan sebagai universalisme islam. Persoalannya, ketika wujud dari kemanusiaan adalah perlindungan atas hak-hak dasar manusia yang salah satu rumusnya terdapat dalam tradisi maqasid al-syariah²⁹

Menurut Gus Duria terletak di dalam dua hal. Pertama, perlindungan atas hak asasi manusia telah terpatritasi dalam pemikiran Gus Dur tentang universalisme islam. Sementara pengembangan struktural masyarakat yang adil merupakan praksis demi perlindungan atas hak asasi manusia tersebut. Artinya humanisme Gus Dur akhirnya tidak berhenti pada perlindungan hak asasi manusia, yang bisa menggelincirkan humanismenya ke dalam jurang individualisme. Hal ini tentu terkait dengan konsep etika sosial islamnya,

²⁹ Abdurrahman Wahid, *Agama dan Tantangan Kebudayaan, dalam pergulatan negara, agama, dan kebudayaan*. Depok: Desantara, 2001, hlm, 89.

karena bagi Gus Dur kemanusiaan diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak dasar manusia di dalam kerangka kehidupan sosialnya. Artinya, kemanusiaan menyatu dengan sosialitas manusia, sebab di dalam sosialitas tersebut hak-hak dasar manusia sering dikebiri, oleh karenanya harus diperjuangkan kembali. Watak kemanusiaan yang sosial ini terlihat dalam rumusan Gus Dur atas bentuk ideal dari hak asasi manusia.³⁰ Corak hak asasi manusia Gus Dur yang mengacu pada keseimbangan antara pendekatan liberal dan pendekatan struktural. Pendekatan liberal merujuk pada pemberian hak-hak yuridis-politis yang akhirnya melahirkan hak sipil dan politik. Pendekatan minimalis ini terkritik, Gus Dur menawarkan pendekatan struktural yang merupakan bagian dari generasi kedua dan ketiga dari HAM.

Ini menyimpulkan bahwa bukanlah humanisme liberal, melainkan humanisme komunitarian. Liberalisme menempatkan individu sebagai pusat realitas sehingga masyarakat dampak dari kontrak sosial yang dibuat oleh individu demi pemenuhan kepentingan perindividu. Pemuliaan individu akhirnya menjadi bagian dari pemuliaan nilai-nilai yang

membatin di dalam kultur, di mana individu lahir di dalamnya.³¹

Berdasarkan dua manifestasi humanisme Gus Dur, yakni perlindungan atas ham serta pengembangan struktural masyarakat yang adil, humanisme tersebut tentu bukan humanisme liberal melainkan humanisme komunitarianisme. Komunitarianisme terletak pada penolakan Gus Dur atas liberalisme hak asasi manusia untuk concern kepada kebaikan komunitas, dalam hal ini masyarakat, yang terpraksis dalam pengembangan struktur masyarakat berkeadilan. Jika meminjam nilai-nilai Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, telah Gus Dur benamkan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, humanisme Gus Dur bukan humanisme abstrak melainkan humanisme sebab sebagai manusia. Gus Dur bahkan menempatkan universalisme humanitarian tersebut sebagai universalisme islam. Hal ini menarik, dan menandakan de-eropenisasi humanisme, sebab humanisme sebagai dsikursus universal memang lahir dari Rahim pencerahan eropa. Pendasaran humanisme dari tradisi islam ini sangat menonjol dalam pemikiran Gus Dur,” pada mulanya orang baru beriman saja kemudian ia melaksanakan islam ketika ia menyadari

³⁰ Abdurrahman Wahid, *Mencari Perspektif Baru dalam Penegakan hak asasi manusia, dalam Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2010, hlm, 90-100.

³¹ Jonathan Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*. New York: Oxford University Press, 2006, hlm, 180-181.

pentingnya syariat. Barulah ia memasuki yang lebih tinggi dengan mendalami tasawwuf, hekekat, dan ma'rifat.³²

Pendasaran humanisme dalam tradisi islam juga Gus Dur pijakkan pada tradisi intelektual islam, khususnya pada diri imam Khalil al-Farahidy. Perumusan kamus Bahasa arab dalam kerangka susunan yang pembedangan pengetahuan menurut para filsuf yunani ini, menurut Gus Dur menjadi titik pijak dari humanisme dalam islam. Gus Dur menemukan tradisi humanisme di dalam islam pada sosok dan karya imam al-farahidy.³³ Dari sini menjadi mafhum bahwa yang dimaksud sebagai humanisme adalah perluasan wawasan islam ke ranah pengetahuan di luar dirinya, hingga bertemu dengan pengetahuan-pengetahuan global seperti filsafat yunani. Humanisme juga dipahami dalam rangka kontekstualisasi islam, sebagaimana apresiasi Gus Dur atas al-risalah imam syafi'I yang mempertemukan ketaatan normatif atas teks islam dengan pembumian teks tersebut ke dalam realitas kehidupan. Pemahaman humanisme sebagai perluasan pengetahuan islam ke ranah global inilah yang disebut Gus Dur sebagai kosmopolitanisme islam yang merupakan

prasyarat pradigmatis bagi perjuangan universalisme islam. Ini menandakan kosmopolitanisme islam ini ternyata selaras dengan pemahaman Gus Dur atas humanisme di dalam sejarah awal islam.³⁴

8. Kesatuan Islam

Jalinan ini berada di dalam kesatuan pemikiran islam serta kesatuan pemikiran sosial-budaya-politik. Kesatuan struktural yang penulis maksud adalah kesatuan nilai yang dibentuk oleh elemen-elemen pemikiran yang saling mengandalkan dan mengunci. Dalam kaitan ini, penulis akan menggambarkan terlebih dahulu kesatuan islam sebagai dasar ontologies dari keislaman Gus Dur. Dari sana kita akan menemukan *wetanschauung* islam yang merupakan epistemologi islam Gus Dur. Epistemologi inilah yang melahirkan produk-produk pemikiria islam yang saling menyatu dan membentuk kesatuan pemikiran islam.

Di dalam dasar ontologis, Gus Dur memahami islam di dalam tiga realitas, yakni realitas universal, realitas cosmopolitan, dan realitas kultural. Hal ini tergambar dalam tiga gagasan keislaman yang menurut penulis merupakan tiga realitas keislaman yang menjadi pijakan dan muara normative dari keislaman Gus

³² Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi islam...*, hlm, 188.

³³ Abdurrahman Wahid, Imam Khalil Al-Farahidy dan Humanisme dalam Islam, Jakarta, 10 Agustus 1987, hlm, 3-4

³⁴ Abdurrahman Wahid, Asal-usul tradisi keilmuan pesantren, dalam jurnal pesantren adisi oktober-desember 1984, hlm, 219-220.

Dur. Tiga gagasan ini meliputi, universalisme islam, kosmopolitanisme islam, dan pribumisasi islam. Universalisme islam seperti termaktub di atas, merupakan nilai-nilai yang paling universal di dalam islam, yang merujuk pada kepedulian islam atas nasib kemanusiaan. Manifestasinya terdapat pada jaminan atas hak-hak dasar manusia dan menjadi tujuan etis bagi perumusan syariat islam. Sementara itu, kosmopolitanisme islam adalah realitas keislaman yang mendunia, sebab bertemu dengan realitas peradaban-peradaban besar yang mengglobal. Artinya, agar umat islam bisa mewujudkan universalisme islam, mereka harus berislam secara cosmopolitan.³⁵

Dari teks ini terlihat bahwa kosmopolitanisme islam merupakan keseimbangan antara ketaatan normative dalam memenuhi ajaran islam, yang akhirnya meluaskan wawasan islam, selayak perluasan wawasan islam sehingga bertemu dengan pengetahuan yunani di masa awal islam, serta dengan peradaban eropa di masa modern islam. Kosmopolitanisme islam ini akhirnya menjadi prasyarat metodologis bagi pengembangan universalisme islam, sebab tanpanya nilai-nilai universal islam hanya akan menjadi kerangka teoritik dan bahkan moralistic yang tidak bisa diterapkan di dalam

realitas kontemporer masyarakat modern. Pertanyaanya, kenapa universalisme islam mensyaratkan kosmopolitanisme islam? Jawabannya jelas. Sebab, kehidupan terkhusus di era modern, membutuhkan pengetahuan akan seluk-beluk modernitas tersebut. Dengan pengetahuan modern yang dicapai melalui kebebasan berpikir, umat islam bisa menerapkan universalisme islam melalui pranata-pranata modern. Sebut aja jaminan atas hak-hak dasar manusia, sejak hak hidup, hak beragama, hak bekerja, hak kepemilikan, dan hak keluarga. Kesemua jaminan itu tentu membutuhkan struktural politik yang melindungi hak-hak tersebut. Struktur politik itu merupakan struktur politik modern yang dinaungi oleh sistem demokrasi dan ditopang oleh supremasi hukum. Dengan demikian kosmopolitanisme islam merupakan pertemuan islam dengan demokrasi, serta pertemuan hukum islam dengan hukum modern, demi menjaga dan mewujudkan nilai-nilai universal islam itu sendiri.

Sementara itu, pribumisasi islam telah kita ketahui bersama. Ia merupakan pembacaan Gus Dur atas mekanisme islamisasi nusantara yang akhirnya membentuk corak khas islam nusantara. Pribumisasi islam juga merupakan upaya kontekstualisasi islam ke dalam realitas masyarakat dengan memanfaatkan metode pengambilan hukum yang disediakan

³⁵ Abdurrahman Wahid, *Universalisme Islam...*, hlm. 1-7.

olehusul fiqh dan qawaid al-fiqhiyyah. Dalam artian ini kosmopolitanisme dan pribumisasi islam merupakan pertemuan tradisi baik dengan tradisi modern maupun dengan tradisi tradisional. Dari sini jelas bahwa modernisasi islam Gus Dur tidak tercabut dari akar tradisi, sebab Gus Dur tetap berpijak dari dua tradisi islam, yakni tradisi otentik islam (universalisme islam), dan tradisi islam nusantara yang dibentuk oleh pribumisasi islam. Proses pertemuan naik-turun antara tradisi islam dan tradisi modern-tradisioanal inilah yang membuat keislaman Gus Dur bersifat modern, tetapi tetap mengakar dalam tradisi islam dan tradisi kenusantaraan. Baik proses menaiki kosmopolitanisme islam, maupun proses menuruni pribumisasi islam, dipijakkan dan digerakkan dalam kerangka menjaga dan mewujudkan universalisme islam. Artinya kosmopolitanisme islam ditujukan demi perlindungan atas hak-hak dasar manusia melalui dan di dalam pranata kehidupan modern.

Pada titik inilah humanisme terpatritri, yakni dalam universalisme islam dan dalam upaya Gus Dur mewujudkan universalisme tersebut, baik melalui kosmopolitansime maupun pribumisasi islam. Dengan demikian, humanisme Gus Dur bersifat praktis. Ia merupakan gerakan modernisasin islam, sekaligus tradisional islam. Melalui modernisasi, universalisme

islam bisa diwujudkan melalui budaya local dan di dalam kehidupan real masyarakat local. Universalisme islam itu adalah perlindungan atas hak dasar manusia, dan penempatan manusia sebagai tujuan utama penerapan ajaran islam yang luhur. Dalam kerangka perwujudan universalisme islam inilah Gus Dur kemudian menggariskan suatu *wetanschauung*. Papar beliau: “ajaran islam bisa dibedakan antara nilai dasar dan kerangka oprasionalnya. Nilai dasar adalah nilai dasar yang mendasari kehidupan masyarakat, yang intinya adalah keadilan, persamaan, dan demokrasi. Prinsip oprasiasi nilai-nilai dasar ini sudah dirumuskan kaidah fiqh, *tasarraful imam ala ra’yyatihi manutun bil masalahah*. Dengan Bahasa sekarang, harus dijunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan persamaan di muka undang-undang. Jadi pandangan dunia islam mengakomodasikan Kenyataan-kenyataan yang ada sepanjang membantu dan mendukung kemaslahatan rakyat.”³⁶

Pada titik ini, *wetanschauung* islam memiliki dua posisi strategis, pertama sebagai nilai-nilai substantif islam yang Gus Dur bedakan dengan nilai-nilai simbolik islam. Nilai-nilai simbolik itu terletak pada formalisme syariat islam atau

³⁶ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam...*, hlm. 131.

simbolisme budaya islam-arab yang berupaya ditegakkan oleh muslim formalis. Hal ini Gus Dur sebut sebagai *quasi-wetanschauung* (*syibh nadhariyyah an al-hayah*) yang akhirnya menjadi ideologi semu.³⁷

Penempatan ketiga nilai di atas sebagai *wetanschauung* islam, semakin jelas ketika pandangan dunia ini kemudian ditopang dan diwujudkan melalui prinsip operasional berupa kaidah fiqh, *tasarraful imam ala ra'yyatihi manutun bil maslahah*. Dengan demikian Gus Dur telah menurunkan prinsip-prinsip umum penataan masyarakat kepada ranah politik, yakni ranah legitimasi kepemimpinan berdasarkan kesejahteraan. Hal ini bisa dipahami karena sejak awal, Gus Dur memahami tujuan utama turunya risalah islam tersebut, adalah sebagai pembawa kesejahteraan bagi umat manusia.

Dari sini terlihat pula bayangan humanisme, yakni dalam penempatan kesejahteraan rakyat sebagai nilai utama yang menjadi perasan dari tiga nilai pandangan dunia islam. Mengapa humanisme? Sebab, muara dari kesejahteraan rakyat adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia yang berarti upaya pemulihan martabat manusia. Papar Gus Dur: “bahwa islam berfungsi penuh dalam kehidupan masyarakat bangsa

melalui pengembangan nilai-nilai dasarnya sebagai etika masyarakat yang bersangkutan. Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, tetapi sebagai etika sosial yang memandu jalan kehidupan bernegara dan bermasyarakat itu sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia, karena pada analisis terakhir, manusialah yang menjadi objek upaya penjejahteraan hidup.”³⁸

Dalam praksisnya, corak humanisme sosial ini kemudian dirawat dan digerakkan Gus Dur melalui pemikirannya, baik pemikiran islam maupun pemikiran sosial-politik. Di dalam pemikiran islam misalnya, humanisme sosial Gus Dur perjuangkan melalui islam sebagai etika sosial. Gagasan ini memiliki prinsip: “Q.S (2:177) menunjukkan bahwa struktur masyarakat yang adil harus ditandai dengan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan orang-orang yang menderita dan pengerahan dana untuk membela kaum lemah.”³⁹

Humanisme sosial juga terdapat di pemikiran negara kesejahteraan islam. Papar beliau: “pengutamakan kemaslahatan umum umum dituntut dalam bentuknya yang operasional, bukan sekedar dalam

³⁷ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam...*, hlm. 132.

³⁸ Abdurrahman Wahid, *Islam dan Masyarakat Bangsa, Jurnal Pesantren*, No.3 Volume VI, 1989, hlm, 75.

³⁹ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam...*, hlm. 136.

prinsip global. Salah satu kaidah fiqh adalah kebijaksanaan pemimpin harus didasarkan pada kepentingan orang banyak. Salah satu kerangka operasionalnya adalah perintah menyelenggarakan jihad, yang tentunya beban terberat terletak di pundak para pemegang kekuasaan. Dalam *I'tanah al-thalibin* ditentukan bahwa salah satu bentuk jihad adalah menjaga mereka yang dilindungi oleh islam dari kerusakan.”⁴⁰

9. Dehumanisasi Islam

Dari paparan di atas terdapat bahwa humanisme Gus Dur merujuk pada dua hal. Pertama, pemuliaan islam atas manusia yang melahirkan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Perlindungan ini merupakan tujuan utama syariat dan akhirnya menjadikannya universalisme islam. Kedua, perluasan pengetahuan ke ranah peradaban lain, seperti Yunani dan Eropa. Perluasan pengetahuan islam yang disebut kosmopolitanisme islam ini disebut humanis, karena ia menerobos sekat-sekat kultural keislaman. Penerobosan ini akhirnya mengantarkan islam ke dalam keluasan kebenaran yang universal dalam rangka kebenaran humanitarian.

Tetap di dua bentuk humanisme inilah dehumanisasi islam terjadi. Artinya, selain memaparkan tradisi humanis di dalam islam, Gus Dur juga menggali proses dehumanisasi yang terjadi pada tradisi islam setelah memancarkan kece-merlangan humanisme islam. Islam berada di tegangan antara proses humanisasi dan dehumanisasi. Pada satu sisi ajaran islam menyediakan dasar-dasar humanisme. Namun di sisi lain, sebagian praktek sejarah telah memberangus ajaran-ajaran tersebut sehingga melahirkan dehumanisasi.

Gus Dur menggerakkan rehumanisasi islam dengan melawan islamisasi budaya dan politik. Pada ranah budaya, Gus Dur menajadikan pribumisasi islam sebagai upaya rehumanisasi budaya islam tersebut. Pribumisasi islam menawarkan pendekatan yang lebih humanis melalui hubungan yang tak subordinatif, tetapi saling menyerap. Islam membumikan ajarannya ke dalam bentuk budaya local. Dengan demikian, islam akhirnya mengalami perluasan bentuk dari bentuk Arabis kepada bentuk baru Nusantara. Pada titik yang bersamaan, pribumisasi islam juga memberikan ruang bagi penanganan persoalan manusia di dalam ketegangan agama dan budaya. Sebab, pribumisasi islam bukan hanya lokalisasi kultur islam, melainkan pula kontekstualisasi islam

⁴⁰ Abdurrahman Wahid, Masih Relevankah Teori Kenegaraan Islam. Makalah diskusi konsep negara islam, FH-UII, Yogyakarta, 7 Februari 1988, hlm. 2-3.

kepada persoalan manusia kontemporer. Sementara itu, atas dehumanisasi dalam bentuk islamisasi politik, Gus Dur menggalakkan rehumanisasi islam dalam bentuk gagasan negara kesejahteraan islam.⁴¹ Dehumanisasi melalui pebatasan pengetahuan islam. Hal ini merupakan gerak destruktif yang terjadi pada humanisme sebagai perluasan pengetahuan islam.⁴²

Gus Dur melakukan rehumanisasi islam dengan menjadikan cita keadilan sebagai substansi islam dan meletakkannya sebagai poros kenegaraan. Oleh karena itu, solusi Gus Dur atas islamisasi politik bukanlah sekularisasi, yakni pemisahan islam dan politik. Sebaliknya, Gus Dur tetap berangkat dari kesatuan islam dan politik dalam kerangka politik keadilan. Karena bagi Gus Dur, keadilan adalah salah satu nilai utama islam, nilai ini bisa menjadi sumbu utama politik islam yang berbeda dengan utopia negara islam.

KESIMPULAN

Humanisme Gus Dur adalah prinsip utama pemikiran Gus Dur. *Pertama*, pemikiran Gus Dur yang mencerminkan humanisme. Secara tekstual menandakan nilai-nilai kemanusiaan sebagai hal yang paling prinsipil di dalam

pemikirannya. “Pandangan ontologis” Gus Dur atas manusia, ternyata berada di dalam domain keislaman. Prinsip humanisme islam di dalam apa yang Gus Dur sebut sebagai *universalisne islam*. Bentuk-bentuknya yang akhirnya mempraksis pada kaidah fikih, *tasharruf al-imam ala al-ra’yyah manuthun bi al-mashlahah* hingga pendasaran humanisme di dalam corak Hak Asasi Manusia (HAM) yang Gus Dur pilih. Ini menandakan Gus Dur berada di titik keseimbangan antara pendekatan liberal yuridis-politis dengan pendekatan struktural sosio ekonomis.

Kedua, humanisme di dalam jalinan struktural pemikiran Gus Dur. Terjadi jalinan dua prinsip, yakni prinsip kesatuan pemikiran islam dan prinsip kesatuan kebudayaan. Kesatuan pemikiran islam adalah jalinan struktural antara *pribumisasi islam, islam sebagai etika sosial, dan negara kesejahteraan islam*. Humanisme islam sendiri berada di dalam kesatuan pemikiran islam tersebut. Sementara kesatuan kebudayaan merupakan kesatuan pemikiran sosial-budaya, demokrasi, dan ke-nu-an. Di dalam prinsip ini, kebudayaan sebagai kehidupan sosial manusiawi menjadi dasar bagi demokrasi sebagai proses serta peran kebangsaan NU yang menggambarkan komitmen Gus Dur atas perjuangan kemanusiaan dalam bentuk penegakan keadilan sosial.

⁴¹ Abdurrahman Wahid, “Development...”, hlm. 2

⁴² Abdurrahman Wahid, Asal-usul tradisi keilmuan pesantren. Dalam *Jurnal Pesantren*, Edisi Oktober-November 1984, hlm. 220-221.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syaiful. 2009. *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif, Sebuah Biografi Intelektual*. Depok: Koekoesan.
- Wahid, Abdul. 2018. *Karena Aku Manusia, Sayangi Manusia: Mewarisi Perjuangan Kemanusiaan Gus Dur Dan Gus Mus*. Yogyakarta: DIVA Press
- Aristoteles. 2004. *Nicomachean Ethick, Sebuah Kitab Suci Etika. Embon Kenyowati*. Jakarta: Teraju.
- Wahid, Abdurrahman. 1979. "Development By Developing Ourselves," *Makalah Seminar The Study Day on Asean Development Process and Their Effect and People*, Penang Malaysia 22-25 November 1979.
- Wahid, Abdurrahman. 1988. *Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*. Pelita.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara.
- Wahid, Abdurrahman. 2000. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, Abdurrahman. 1988. Paradigma Pengembangan Masyarakat Melalui Pesantren. *Jurnal Pesantren*, Vol. V No. 3.
- Wahid, Abdurrahman. tt. *Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta. LKiS.
- Wahid, Abdurrahman. 1991. *Universalisme Dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*. Arifin junaidi.
- Wahid, Abdurrahman. *Imam Khalil Al-farahidy dan Humanisme Dalam Islam*. Sumber tak terlacak, Jakarta 10 Agustus 1987.
- Wahid, Abdurrahman. *Fiqh dan Sosial Kita*. Kompas
- Wahid, Abdurrahman. *Demokrasi, Sebuah Pertanggung Jawaban*. Makalah Ketua Paksa Forum Demokrasi, 1992.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*. Kacung Majidan, Ma'mun Murad. Jakarta: Grasindo.
- Wahid, Abdurrahman. 1984. *Asal-Usul Tradisi Keilmuan Pesantren*. *Jurnal Pesantren*, Edisi Oktober-November.
- M. Sitompul. 1989. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Tuhan Tidak Perlu di Bela*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid, Abdurrahman. *Pancasila Dan Kondisi Objektif Beragama*. Kompas.
- Wahid, Abdurrahman. *Demokrasi, Agama dan Perilaku Politik Bangsa*. Makalah Seminar IMM Komisariat FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, 27 Oktober 1993.
- Evans, don. 1999. *Humanisme and Religion. Dalam Don Evans Humanism, Historical and Contemporary Perpective*, Washington D.C: Washington area secular humanist.
- Ramage, Douglas E. 1997. *Pemahaman Abdurrahman Wahid Tentang Pancasila dan Penerapannya*. Yogyakarta: LKiS.
- Hardiman, F. 2019. *Budi Demokrasi Deliberative of Communicative Action, Lifeword And System: A Critique of Fungsionalist Reason*. Boston: beaosn press.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2009. *Filsafat Kebudayaan, Proses Realisasi Manusia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Yahya, Iip D. 2004. *Seri Pejuang Kemanusiaan, Gus Dur, Berbeda Itu Asyik*. Yogyakarta: Kanisius.